

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitra, *Hapusnya Hak dan Menuntut Menjalankan Pidana*, Jakarta: Raihasa Sukses, 2012.
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ardiansyah, Irfan, *Disparitas Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2017.
- Ashafa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Asmarawati, Tina, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Astawa, I. Gede Pantja, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2008.
- Atmasasmita, Romli, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Rafika Aditama, 2018.
- Burhan, Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Darwis, Ranidar, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia UPI, 2003.
- Djamali, Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Fajar, Mukti & Achmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2001.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- _____, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: Pradanya Paramita (anggota IKAPI), 2020.
- _____, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015.
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

- Mahrus, Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 97.
- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Masriani, Yulies Tiena, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muladi & Arief, Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005.
- Mulyadi, Mahmud & Surbakti, Feri Antoni, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Jakarta: Sofmedia, 2010.
- Muntaha, *Kapita Selekta Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Notohamidjojo, O., *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media, 2011.
- Pitoyo, Whimbo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Visimedia, 2010.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Grafindo Persada, 2020.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Remmelink, *Pengantar Hukum Pidana Material 3: Hukum Panitensier*, Yogyakarta: Maharsa, 2017.
- Sanusi, Anwar, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2016.
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Pengangkutan Laut*, Bandung: Nuansa Aulia, 2019.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2011.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Suharto & Efendi, Junaidi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010.
- Syamsuddin, Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Thalib, Hambali, *Sanksi Pidana dalam Konflik Pertahanan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.
- Zaidan, M. Ali, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Jurnal/Artikel/Internet:

Fakhrurrozi, “Tanggung Jawab Pidana bagi Nakhoda Kapal yang Berlayar Tanpa Surat Persetujuan Berlayar”, *Juristic*, Vol. 01, No. 03, Desember 2020:256-266, e-ISSN 2721-6098.

Ramadhan, Satria, “Penyidikan Tindak Pidana Tanpa Surat Persetujuan Berlayar oleh Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Rengat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran”, *JOM Fakultas Hukum*, Vol. III, No. 2, Oktober 2016:1-15.

Samekto, A.A., “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keselamatan Pelayaran Kapal Penangkap Ikan di Pelabuhan Tasikagung Rembang”, *Jurnal Sains dan Teknologi Maritim*, Vol. 19, No. 2, 2019:196–202.

Sonhaji, “Pemberian Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dalam Upaya Pemenuhan Keselamatan Berlayar. *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 1, Edisi 3, Agustus 2018.

Surahman, “Tanggung Jawab Pidana terhadap Nakhoda Kapal yang Melayarkan Kapal nya Tanpa Laik Laut Sesuai Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (Studi di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pontianak)”, *Nestor: Tanjungpura Journal of Law*, Vol. 4, No. 4, 2018. ISSN: 0216-2091.

Wikipedia (Ensiklopedia Bebas), *Pelayaran*, Online: <https://id.wikipedia.org/wiki/Pelayaran>, diakses tanggal 30 November 2022, pukul 13.35 WIB.

Zulfahmi & Mukhlis, “Penerapan Sanksi Pidana terhadap Nakhoda Kapal Perikanan yang Tidak Memiliki Surat Persetujuan Berlayar”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Vol. 2, No. 2, Mei 2018:236-244, ISSN: 2597-6893.